

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan faktor penting dalam mendukung perekonomian di Indonesia karena peran koperasi secara tidak langsung dapat membantu pemberdayaan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan mendorong penyertaan keuangan. Selain itu, koperasi telah berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat yang berdampak pada kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional sehingga koperasi dapat disebut sebagai guru utama dalam perekonomian di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah koperasi aktif di Indonesia sebanyak 130.354 unit dengan volume usaha sebesar Rp197,88 triliun pada 2022 (Rizaty, 2023).

Koperasi merupakan suatu organisasi bisnis berupa produsen, konsumen, simpan pinjam, pemasaran dan jasa. Koperasi sendiri dioperasikan oleh orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk menjadi anggota. Dimana koperasi memiliki asas kekeluargaan dan gotong royong untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran anggotanya.

Irwadi, *et.al* (2021) menyatakan koperasi merupakan salah satu entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan. Penerbitan laporan keuangan digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik untuk memberi informasi kepada pihak internal dan pihak eksternal secara transparan dan relevan. Pihak internal yang dimaksud adalah pemilik, anggota, manajemen dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal yang dimaksud adalah investor, perbankan sebagai kreditor dan pemerintah.

Mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015, standar akuntansi pada koperasi menggunakan SAK ETAP apabila koperasi tidak memiliki akuntabilitas publik. Sehingga koperasi harus menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 19 Mei 2009 dan berlaku efektif per 1 Januari 2011. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sendiri dibuat untuk memberikan fleksibilitas entitas dalam menyelenggarakan akuntansi yang lebih sederhana.

Susanto, *et.al* (2020) menyatakan informasi dalam berbagai bentuk dibutuhkan makin cepat, lengkap dan sesuai dengan standar, seperti laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan dokumen yang berisi informasi-informasi mengenai kinerja keuangan suatu entitas pada periode tertentu. Laporan keuangan merupakan salah satu indikator kesehatan suatu perusahaan (Hutabarat, *et.al*, 2023).

Susanto, *et.al* (2020) meneliti penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan di PT.XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian laporan laba rugi sebesar 3 dan ketidaksesuaian sebesar 5 yang disebabkan kesalahan dalam pengakuan pendapatan dan biaya. Dan dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa kesesuaian laporan PT. XYZ terhadap SAK ETAP masih 35%.

Irwadi, *et.al* (2021) meneliti penerapan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada Koperasi Al-Hudori Cabang Sekayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan yang disajikan Koperasi Al-Hudori Cabang Sekayu adalah laporan neraca dan laporan laba rugi serta laporan keuangan pada Koperasi Al-Hudori Cabang Sekayu masih menyajikannya secara sederhana dan belum sesuai dengan SAK ETAP.

Hutabarat, *et.al* (2023) meneliti implementasi SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan pada Koperasi Credit Union Kasih Setia Pulau Tello. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Credit Union Kasih Setia Pulau Tello tahun 2020 dan 2021 masih menyajikan neraca dan laporan laba rugi. Dengan menerapkan teknik perhitungan checklist metode Champion yang diusulkan James A. Blake dan Dean J. Champion, peneliti mengidentifikasi 60% ketidakpatuhannya

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan pada Koperasi Credit Union Kasih Setia Pulau Tello belum sesuai dengan SAK ETAP.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada KSU Reski Utama yang merupakan suatu organisasi dalam bidang simpan pinjam. Peneliti melakukan penelitian pada KSU Reski Utama karena KSU Reski Utama belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP dalam menyajikan laporan keuangannya.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik melakukan penelitian pada KSU Reski Utama dengan mengangkat judul “Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atas penyajian Laporan Keuangan (Studi pada KSU Reski Utama)”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang sudah peneliti sampaikan diatas, maka fokus masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan pada KSU Reski Utama?
2. Bagaimana implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam menyajikan laporan keuangan pada KSU Reski Utama?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk:

1. Mengetahui penyajian laporan keuangan KSU Reski Utama.
2. Menganalisis implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam menyajikan laporan keuangan pada KSU Reski Utama.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi banyak pihak. Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diantaranya sebagai berikut:

1. Teoritis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

2. Praktis

a. Bagi peneliti

Peneliti dapat mengetahui dan memahami laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan juga peneliti dapat mengimplementasikan teori dan ilmu yang telah didapatkan mengenai penyajian laporan keuangan.

b. Bagi koperasi

Sebagai bahan evaluasi dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

c. Bagi pihak lain

Sebagai tambahan informasi bagi pembaca dan bagi peneliti berikutnya mengenai laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).